

ABSTRAK

Perusahaan sebagai suatu unit usaha yang mempekerjakan karyawan-karyawan diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 terhadap karyawannya. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang ditanggung karyawan. Tetapi, jika perusahaan mempunyai kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 tersebut, maka ada tiga alternatif kebijakan lainnya yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan dan PPh Pasal 21 di *gross up*

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah perbandingan antara keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yaitu kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai, ditanggung oleh perusahaan, ditunjang oleh perusahaan dan di *gross up* serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terutang pada PT Himpurna Karya Mandiri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan pada PT Himpurna Karya Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Pengerahan Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, PT Himpurna Karya Mandiri selama ini menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan daripada penerapan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, ditanggung perusahaan, diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan, khususnya dalam hal pajak penghasilan terutang dan jumlah gaji yang dibawa pulang oleh pegawai (*take home pay*).

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran.....	5
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
2.1 Pengertian Umum Pajak.....	10
2.1.1 Definisi Pajak.....	10
2.1.2 Ciri- Ciri Pajak.....	14
2.1.3 Fungsi Pajak.....	15
2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	16
2.1.5 Teori Pendukung Pemungutan Pajak.....	19
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	21
2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	22
2.1.8 Tarif Pajak.....	25
2.1.9 Timbulnya Utang Pajak.....	26
2.1.10 Hapusnya Utang Pajak.....	27
2.2 Pajak Penghasilan.....	29
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan.....	29
2.2.2 Subjek Pajak.....	29
2.2.3 Pengecualian Subjek Pajak.....	31
2.2.4 Objek Pajak.....	32

2.2.5	Pengecualian Objek Pajak.....	35
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	37
2.3.1	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	37
2.3.2	Wajib Pajak PPh Pasal 21	38
2.3.3	Objek Pajak PPh Pasal 21.....	43
2.3.4	Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.....	46
2.3.5	Pemotongan Pajak PPh Pasal 21.....	48
2.3.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	54
2.3.7	Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	56
2.4	Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21.....	65
2.4.1	Alternatif Penghitungan PPh Pasal 21.....	65
2.4.2	Pajak Penghasilan Terutang.....	72
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....		74
3.1	Objek Penelitian.....	74
3.1.1	Latar Belakang Perusahaan.....	74
3.1.2	Visi, Misi Perusahaan.....	75
3.1.3	Lingkup Kegiatan Perusahaan Perusahaan.....	73
3.1.4	Struktur Organisasi Perusahaan.....	78
3.1.5	Uraian Tugas dan Tanggung jawab.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		89
4.1	Data Perusahaan PT Himpurna Karya Mandiri.....	89
4.2	Kebijakan PPh Pasal 21 yang Dijalankan oleh Perusahaan.....	92
4.3	Penerapan PPh Pasal 21.....	93
4.3.1	Perhitungan PPh Pasal 21.....	93
4.3.2	Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21 dan Pengaruhnya Terhadap PPh Terutang.....	105
4.4	Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21.....	121

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....125

5.2 Saran.....127

DAFTAR PUSTAKA.....129

LAMPIRAN I.....I